



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG METEOROLOGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO PRASETYO
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 738906

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 18.500.000

1. MOTOR, HONDA NF12A1CF MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 61.932.045

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 405.909.816

F. HARTA LAINNYA Rp. 78.000.000

Sub Total Rp. 3.299.341.861

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.299.341.861

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.